



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 23 Agustus 2025

Halaman: 3

## Masih Ada 49 Ribu Rumah Nirlayak Huni

**YOGYA. TRIBUN** - Di tengah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang digencarkan pemerintah daerah, DIY masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Dari hampir 57 ribu unit RTLH yang tercatat pada 2022, lebih dari 49 ribu di antaranya hingga kini belum tersentuh perbaikan.

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral

(PUP-ESDM) DIY, Kwaryantini Ampeyanti Putri mengatakan, tahun ini pemerintah daerah bersama pemkab/pemkot serta dukungan corporate social responsibility (CSR) akan menanganai 1.460 unit RTLH.

"Tahun ini untuk kewenangan Pemda DIY, kami menanganai sebanyak 290 unit. Rinciannya, 281 unit melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari dana keistimewaan, enam unit RTLH terintegrasi di Kalirejo, Kokap, Kulon Progo, serta 30

unit dari CSR," ujarnya, kemarin.

Kwaryantini menegaskan, penerima program harus memenuhi sejumlah persyaratan agar tepat sasaran. "Sasaran RTLH harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), memang layak dibantu, dan kondisinya miskin," katanya.

Selain itu, warga penerima bantuan juga wajib berkontribusi melalui swa-

daya. "Untuk RTLH dari Pemda DIY, ada persyaratan kemampuan pemilik untuk berkontribusi. Mereka harus swadaya karena bantuan sifatnya stimulan. Mereka juga harus punya kemampuan untuk ikut membangun," jelasnya.

Jenis bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari renovasi hingga pembangunan baru. "Untuk peningkatan kualitas rumah dari anggaran Pemda DIY nilainya Rp20 juta, kalau pembangunan

baru Rp50 juta". Sedangkan untuk RTLH dengan mekanisme BKK anggarannya senilai Rp65 juta yang dikelola langsung oleh kalurahan. Pengelolannya tidak berada di kami, kami hanya monitoring saja," tutur Kwaryantini.

Dengan tambahan 1.460 unit pada 2025, jumlah RTLH yang sudah diperbaiki di DIY akan mencapai lebih dari 7.800 unit. Namun, masih ada puluhan ribu unit lain yang menunggu penanganan. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005